



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL
SUB UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROCH HADI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 214519

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/200 m2 di KOTA SALATIGA ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/36 m2 di KOTA SALATIGA ,
HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 477.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 250.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, TOYOTA HARDTOP JEEP Tahun 1981, HASIL SENDIRI
Rp. 80.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT SPD MOTOR Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 17.000.000
5. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 89.313.490**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.296.313.490

III. HUTANG Rp. 107.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.189.313.490

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **25 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.